

Pembaruan Desa dan Agraria dalam Konteks Otonomi Daerah

R. Yando Zakaria dan Noer Fauzi

Abstrak

Praktisi Antropologi, volunteer pada Institute for Social Transformation (INSIST), Yogyakarta. Turut serta pula dalam kegiatan-kegiatan berbagai ORNOP dan/atau Jaringan Kerja ORNOP. Noer Fauzi Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BP-KPA) 1998-2001.

Kami percaya bahwa keberlangsungan Negara ini juga akan ditentukan oleh seberapa jauh Negara ini mampu menata ulang hubungannya dengan komunitas. Tidak akan ada Negara yang akan bertahan – tanpa tindakan-tindakan politik yang represif -- jika tidak didukung oleh komunitas yang hidup. Makalah ini mengundang suatu cara pikir interaksi antara Negara dan Masyarakat, yang menggantikan cara pikir state centered approach (yang berpusat pada Negara) dan society centered approach (yang berpusat pada komunitas).

Yang diperlukan sekarang adalah -- di satu pihak -- mengubah sosok negara tak lebih sebagai suatu sistem pengurusan administrasi kehidupan bersama yang lentur sejalan dengan dengan mandat yang diberikan oleh rakyatnya. Hal ini hanya bisa terjadi manakala ada suatu kesadaran atas kekeliruan praktek Negara akibat 'sesat pikir' tentang (konsep) Negara itu sendiri.

Di pihak lain, mengubah masyarakat sebagai objek dari perbuatan-perbuatan negara. Yang diperlukan adalah suatu fasilitasi agar terwujud otonomi dari masyarakat sendiri untuk menentukan jenis kelembagaan yang mereka perlukan dalam rangka mengukuhkan 'hak-hak asal-usul' yang merupakan jaminan bagi keberlangsungan dan kemajuan kehidupannya, yang setidaknya terdiri dari (i) sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang telah dimilikinya; (ii) Sistem produksi, konsumsi dan distribusi yang bersesuaian dengan kebudayaan setempat; (iii) Sistem norma - hukum adat yang mengatur keseharian kehidupan, dan (iv) Sistem reproduksi sosial yang mengatur regenerasi ('tongkat estafet') kebudayaan pada generasi berikutnya. Makalah ini mendasarkan diri pada suatu pengalaman baru dari kolektif aktivis organisasi non-pemerintah yang 'bermain' pada posisi antara Negara yang sedang berubah dengan komunitas yang sedang berubah pula. Pengalaman termaksud didahului oleh kerja-kerja advokasi ornop dalam arti luas -- khususnya dalam bidang agraria -- yang diperbarui dalam rangka menghadapi perwujudan TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998, UU 22/1999 hingga PP No. 25/2000. Lebih khusus lagi, pengalaman 'baru' itu, dimulai dari kegiatan pendidikan untuk para pembentuk pemerintahan daerah di lima kabupaten: Sanggau, Bengkayang, Garut, Donggala dan Toraja.